



Lebih Dekat dengan Satu Klik



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033



PERTAMINA PASTIKAN PERTALITE TETAP TERSEDIA

BACA HALAMAN 2-3



**RSUD BONTANG
MEMPERLUAS
LAYANAN KESEHATAN
DENGAN 24 POLIKLINIK
BACA HALAMAN 22**



Sebuah truk BBM Peralite saat tengah mengisi BBM ke salah satu SPBU di Kota Balikpapan.

Pertamina Pastikan Peralite Tetap Tersedia

Distribusi ke SPBU Berjalan Seperti Biasa

BALIKPAPAN – Sebagai bentuk penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014, PT Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan tetap menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ke setiap SPBU yang menyalurkan BBM jenis tersebut. Hal ini diungkapkan Area Manager Communication, Relations dan CSR Kalimantan, Arya Yusa Dwi-

candra, dalam keterangannya pada Senin (16/10/2023).

“Untuk Kota Balikpapan, misalnya, setiap hari kami menyalurkan rata-rata sebanyak 350 Kiloliter (KL) BBM jenis Peralite. Jumlah tersebut tetap sama semenjak 3 bulan terakhir terhitung dari Agustus hingga Oktober ini. Artinya, penyaluran BBM jenis Peralite tetap berjalan seperti biasa dalam 3 bulan terakhir. Bahkan untuk

stok BBM itu sendiri di Integrated Terminal (IT) Balikpapan masih tersedia hingga akumulatif 9-14 hari ke depan,” ujarnya.

Menanggapi maraknya isu penghapusan Peralite di lapangan, Arya menjelaskan bahwa tidak ada rencana penghapusan dalam waktu dekat. “Yang diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina beberapa waktu lalu adalah rencana penam-

bahan bahan bakar nabati, yaitu Ethanol ke produk Peralite menjadi bahan bakar yang lebih baik. Tentu terkait penamaan dan harga masih dalam tahap kajian. Tidak ada perubahan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Sementara itu, banyaknya masyarakat yang mengeluhkan antrian BBM jenis Peralite di sejumlah SPBU, Arya menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa faktor. “Faktor yang pertama adalah

adanya panic buying karena kekawatiran terhadap isu penghapusan Peralite. Dalam hal ini, sekali lagi kami menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan BBM jenis Peralite. Yang kedua, ada beberapa konsumen Pertamina yang beralih ke Peralite karena faktor kenaikan harga di bulan Oktober 2023. Faktor kedua ini yang kami harapkan kesadaran dari konsumen BBM dengan spesifikasi kendaraan minimal RON 92 untuk

tetap menggunakan BBM jenis Pertamina sehingga kualitas kendaraan tetap terjaga,” tambah Arya.

PT Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap terpenuhi. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam pendistribusian energi ke seluruh negeri. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim | mediakaltimdotcom | mediakaltim.com | media kaltim

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo **BTSOLI**

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Garansi, 100% OIL CHANGE, BEST BRAND

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

Bontang



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Suasana Gerakan Pangan Murah di Halaman Parkir Kantor Bupati Kukar.

Pemkab Kukar Gelar GPM 2023 Selama 2 Hari, Siapkan 11 Macam Bapokting

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Parkir Kantor Bupati Kukar, dengan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar sebagai leading sector-nya. Dilaksanakan selama dua hari, sejak tanggal 16-17 Oktober 2023.

Sebanyak 44 tenant yang menggelar berbagai bahan pokok penting (bapokting) dengan harga murah untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya. Bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, ditingkatkan produsen dan konsumen. Agar daya beli pangan masyarakat dapat meningkat. Disamping untuk menjaga tingkat inflasi di Kukar.

"Tahun ini lebih lengkap dan lebih banyak stok bapokting yang disiapkan untuk masyarakat Tenggarong dan sekitarnya," ungkap Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, Senin (16/10/2023).

Dilanjutkan Sutikno, berdasarkan neraca pangan Kukar hingga pekan kedua Oktober 2023, dari 11 Bapokting yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan keriting, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng dapat dikatakan cukup.

Untuk agenda GPM 2023, produk yang dijual disuplai langsung oleh beberapa stakeholder. Diantaranya Badan Urusan Logistik (Bulog), PT RNI, Kelompok Wani Tani (KWT),

BUMDes beberapa desa di Kukar, UMKM pangan dan hasil bumi dari petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Termasuk beberapa toko retail seperti Alfamidi dan Eramart.

Namun, dijelaskan lebih lanjut, GPM 2023 bukan menjadi satu-satunya upaya Pemkab Kukar untuk menekan angka inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemkab Kukar pun sepanjang 2023 ini melakukan Operasi Pasar Murah di 300 titik yang tersebar di 20 kecamatan. Secara bergantian dan menggandeng Bulog.

"Barang yang disajikan diutamakan komoditas sembako asli lokal," tutup Sutikno. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Desa Tanjung Batu Bangun Jalan Desa dan Halte Sungai

TENGGARONG - Desa Tanjung Batu, akan mendapatkan kucuran sejumlah anggaran, untuk pembangunan yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang tersebut. Salah satunya anggaran yang berasal aspirasi anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni pengerasan jalan Desa Tanjung Batu menuju desa sekitarnya.

Yakni berupa pengerasan jalan dari Desa Tanjung Batu menuju Desa Loa Ulung. Jalan yang disasar, dikatakan Kepala Desa (Kades) Tanjung Batu, Husniansyah, masih berupa jalan tanah. Diperkirakan sepanjang 2,7

kilometer (km) jalan yang akan dibangun pada anggaran APBD Perubahan Kukar 2023. "Tahun ini diselesaikan, pengerasan dilakukan secara bertahap dan dikerjakan langsung oleh kecamatan," ujar Husniansyah.

Meski tidak menyampaikan secara detail jumlah anggaran yang dipakai, pengerjaan jalan ini pun akan ditopang oleh dana desa hingga dana Corporate Social Responsibility untuk proses pengurukan tanahnya.

Tak hanya itu, bantuan dari APBN pun mengucur ke Desa Tanjung Batu. Yakni pembangunan halte atau der-

maga sungai yang berada di RT 2. Saat ini terus berproses, bahkan saat ini tengah terus melengkapi beberapa dokumen. Bahkan informasi yang diterimanya, sudah mendapatkan persetujuan untuk pembangunan.

"Fingsi dermaga yang pasti untuk aktivitas warga pesisir mahakam di Desa Tanjung Batu, termasuk dari arah Samarinda-Tenggarong ke arah hulu, saat ini masih terus aktif digunakan," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ISTIMEWA

Suasana rilis Kredit Kukar Idaman yang menysasar petani, pembudidaya ikan dan nelayan.

Rilis Kredit Kukar Idaman, Sasar Petani dan Nelayan

TENGGARONG - Sebagai upaya memudahkan pemodal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pembab Kukar) merilis Kredit Kukar Idaman yang menysasar para petani, nelayan dan pembudidaya ikan. Dirilis bertepatan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) 2023, di Halaman Parkir Kantor Bupati Kukar, pada Senin (16/10/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebut ini terealisasi atas kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar dan Bankaltimtara. Dan didukung langsung oleh Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim.

"Ini menjadi lanjutan program Pembab Kukar. Yakni pemberian Kredit Kukar Idaman bagi Usaha Mikro, Ke-

cil dan Menengah (UMKM) yang terlebih dahulu diluncurkan pada 2021 silam," ujar Edi Damansyah.

Program Kredit Kukar Idaman yang menysasar petani, pembudidaya ikan dan nelayan ini dilakukan mengingat sektor pertanian dalam arti luas di Kukar cukuplah besar. Yakni hamparan pertanian di Kukar yang mampu memproduksi kebutuhan gabah kering di Kaltim yang mencapai 42 persen. Sementara sektor perikanan menyentuh angka 80 persen dari kebutuhan Kaltim, berasal dari Kukar.

Edi pun berharap, cita-cita untuk memberikan penguatan akses pemodal bagi petani, pembudidaya ikan dan nelayan bisaxlebih mudah. Disamping menghindarkan mereka dari jeratan rentenir.

Dalam program Kredit Kukar Idaman, para petani, pembudidaya ikan dan nelayan akan diberikan maksimal pinjaman sebesar Rp 50 juta, dengan bunga 0 persen. Dengan waktu kredit yang diberikan mencapai 36 bulan. Pembayaran pun bisa diatur, yakni salah satunya dengan pembayaran kredit yang menggunakan pola setiap panen atau tiap produksi dengan batas waktu jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

"Alokasi kredit ini dirancang oleh Pembab Kukar dengan mengalokasikan penyertaan modal kepada Bankaltimtara, untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan perekonomian daerah di sektor riil," tutup Edi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ISTIMEWA

Wabup Kukar, Rendi Solihin saat meninjau salah satu lokasi pemasangan LPJU.

Sepanjang 2023, Pemkab Kukar Pasang 2.450 Unit LPJU

TENGGARONG - Selama 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menargetkan 2.450 Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) akan terpasang di 16 kecamatan yang kini belum mendapatkan penerangan. Bahkan pemasangan pun akan disebut oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, sebelum 2023 berakhir.

Berdasarkan data yang terima, sejauh ini progres pemasangan LPJU di 16 titik kecamatan, sudah menyentuh angka 85 persen. Dan ini akan terus berjalan, sampai akhir 2023.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar pun

mengelontorkan anggaran hingga Rp 5,9 miliar. Sudah terpasang di 7 titik, baik di hulu, tengah dan pesisir Kukar. "Progresnya positif ya, sekarang tinggal tiga lokasi lagi, dan diperkirakan pekan ini selesai," jelas Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin.

Dalam pemasangannya, Dishub Kukar terus melakukan koordinasi dengan PLN, dalam hal pengadaan daya listrik, travo hingga surat kelengkapan operasi. Pemasangan ini sendiri memakan waktu satu sampai dua hari.

Sebagaimana diketahui, pen-

gadaan LPJU merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemkab Kukar ke masyarakat. Tak hanya untuk menerangi jalan saja, namun juga berkaitan dengan keselamatan pengendara, serta meminimalisir tindak kejahatan.

"Ini adalah bagian dari skema program Terang Kampungku. Untuk DPMD, mereka menangani penerangan di Desa. Disperkim menangani penerangan permukiman, dan untuk Dishub menangani penerangan jalan poros," tutup Rendi. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ISTIMEWA

Wabup Kukar, Rendy Solihin (dua kanan)

Pemkab Kukar Siapkan 6 Unit Bus Sekolah di APBD-P Kukar 2023

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sedang mempersiapkan pemenuhan kebutuhan bus sekolah di Kukar, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar. Pengadaan dirasa sangat perlu, mengingat lokasi geografis Kukar yang unik dan luas.

Disamping memang Pemkab Kukar sedang fokus dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Salah satunya angkutan pelajar yang dirasa perlu untuk alat transportasi murid-murid di Kukar. Ini pun dalam rangka Pemkab Kukar, dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak sekolah.

“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisir rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendy Solihin.

Kebutuhan ini pun kerap disampaikan oleh para orang tua murid kepada Pemkab Kukar. Bahkan langsung disampaikan kepada bu-

pati maupun wabup Kukar. Hal ini pun langsung direalisasikan dalam bentuk uji coba, yang dilakukan di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong. Yakni penyerahan satu unit bus sekolah belum lama ini.

“Kita uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan (bus sekolah). Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” ucap Kadishub Kukar, Ahmad Junaidi, saat mendampingi Rendy.

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan pada APBD-P Kukar 2023 ini, total ada enam unit bus sekolah lagi yang akan disiapkan. Yang kemudian akan diserahkan kepada beberapa kecamatan yang dirasa perlu untuk dilakukan pengadaannya.

Sekedar diketahui, bus sekolah yang disiapkan oleh Pemkab Kukar memiliki spesifikasi 19 kursi dan 30 kursi. Dimana pengadaannya sudah dilakukan dan sedang dirakit di pabriknya. Diperkirakan akan diserahkan dan beroperasi pada awal Desember 2023 mendatang. Kemudian akan

resmi beroperasi pada awal 2024, untuk mengangkut pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Jadi di tahun ini sudah ada satu unit kami anggarkan di murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di perubahan kami adakan enam unit,” lanjutnya.

Pengelolaannya sendiri akan menggunakan sistem swakelola. Dibebankan pada pemerintah kelurahan ataupun desa penerima bantuan. Mulai dari biaya BBM-nya hingga perawatan tahunannya. Dan menasar para murid yang memang dirasa belum layak untuk menggunakan kendaraan sendiri ketika berangkat menuju sekolah.

“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan Insya Allah di tahun 2024 nanti mengikuti arahan kepala daerah akan kita adakan lagi. Kita akan atur konsep dan perkembangannya sesuai dengan keperluan masyarakat,” tutup Junaidi. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Kerap Muncul Buaya, Madri Dorong Pemerintah Koordinasi dengan BKSDA

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu terakhir, peristiwa serangan buaya kerap terjadi kepada para nelayan di daerah pesisir, hal itu disorot serius Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dia mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah harus segera berkoordinasi dengan Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA).

Dikatakannya, sudah banyak peristiwa buaya memangsa nelayan yang berujung kematian. Jika tidak segera ada penanganan, dikhawatirkan mengancam roda perekonomian para nelayan.

"Ekonomi masyarakat terancam. Dulu jarang kita dengar ada buaya makan manusia, tapi sekarang sudah seringkali terjadi. Yang terakhir saya dengar di Kampung Capuak. Ini me-

nimbulkan ketakutan nelayan kita untuk menangkap ikan, bahkan pelaku tambak juga sudah resah karna seringkali mereka sudah mengeluarkan modal besar untuk tambak tapi yang menikmati malah buaya," ujarnya.

Madri menegaskan, harus ada terobosan yang dapat mengakomodir populasi hewan buas tersebut menjadi ekowisata yang aman. "Harusnya dari pemerintah ada program untuk hal-hal seperti ini, misalnya menangkap buaya-buaya tersebut untuk dibuatkan penangkaran khusus yang sekaligus bisa menjadi destinasi wisata untuk masyarakat," jelasnya.

"Dengan begitu populasi buaya tetap terjaga dan masyarakat juga bisa aman dalam mencari nafkah di laut maupun muara laut," tambahnya.

Lanjut Madri, semakin banyak perusahaan pertambangan serta perkebunan saat ini mempengaruhi rantai makanan yang ada. Dengan kata lain, buaya memangsa manusia dikarenakan rantai makanan yang ada saat ini telah rusak akibat maraknya pembukaan lahan untuk pertambangan serta perkebunan tersebut.

Politikus NasDem ini meminta Pemkab Berau melalui DLHK dan BKSDA untuk mengkaji ulang aturan-aturan terkait hal tersebut demi keselamatan masyarakat sekitar pesisir laut.

"Tolong dicarikan solusi untuk menampung atau merelokasi buaya-buaya ini demi keselamatan nelayan. Jangan dibiarkan saja karena dampaknya akan sangat merugikan masyarakat," tandasnya. (adv/dez)

Penataan Ruang Taman, Harus Bisa Digunakan untuk Literasi

TANJUNG REDEB - Penataan taman kota dinilai Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi harus dapat menjadi wadah wisata dan literasi. Dia mengungkapkan, jika penataan taman kota dilakukan maksimal, maka akan menambah daya tarik masyarakat untuk berkunjung. Terlebih saat ini Berau merupakan kabupaten penyandang layak anak. "Taman seharusnya terbuka. Bisa jadi wadah bersantai dan juga membaca buku," ungkapnya.

Menurutnya, penerangan di sekitar taman juga perlu diperhatikan, sebab dapat memicu oknum tidak bertanggungjawab untuk berbuat hal tidak senonoh.

Untuk perawatan taman, kata Ichsan, dapat memanfaatkan pihak ketiga untuk membantu dalam hal pengelolaan. "Misal Taman Cendana, dikelola perusahaan A, itu bisa saja. Jadi tidak harus menggunakan APBD," jelasnya.



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, dengan pengelolaan taman yang baik, akan membantu pemerintah dalam menyediakan ruang baca di perkotaan. Terlebih, dengan adanya program 1000 titik wifi, hal ini

bisa dikonekkan, dengan pojok baca digital. "Betul, ini bisa konek, jadi penggunaan bisa dimaksimalkan untuk menjelajah ilmu," tuturnya.

Dirinya menilai, selama ini taman yang ada dianggap kurang maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga masyarakat tampak kurang berminat menghabiskan waktu untuk duduk bersantai di taman. Padahal Berau memiliki dua taman unggulan yang bisa dimanfaatkan sebagai wadah bersantai dan bermain.

"Tingkatkan pengelolaan dan juga fasilitasnya. Sayang saja jika dibangun, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal," tegasnya.

Kendati demikian, Politikus Gerindra ini menilai, Bupati bisa memerintahkan penjagaan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di taman. "Tentunya bisa jadi sumber PAD, jika dikelola dengan baik dan benar," pungkasnya. (adv/dez)

Pagelaran Berau Expo, Prioritaskan UMKM Lokal

TANJUNG REDEB - Pagelaran Berau Expo tahun 2023 akan digelar. Jajaran legislatif pun meminta agar dalam acara tersebut dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menuturkan, pemerintah harus memprioritaskan UMKM lokal dalam gelaran expo mendatang. Tujuannya untuk memberdayakan dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

"Anggaran untuk Berau Expo 2023 ini cukup besar, yakni sekisar Rp 3 miliar. Jadi harus bisa mendorong atau memberi dampak baik kepada usaha masyarakat lokal," tuturnya.

Ditegaskannya, harga yang dipatok untuk sewa tenda berjualan jangan sampai terlalu membebani masyarakat.

Ia berharap, dengan kucuran dana yang cukup besar, bisa memberikan ruang bagi usaha masyarakat yang ingin ikut serta dalam memeriahkan rangkaian hari jadi Kabupaten Berau ini.

"Boleh dikatakan ini pesta rakyat, dengan nilai Rp 3 miliar nantinya bisa maksimal. Untuk sewa tenda kalau bisa jangan terlalu tinggi kalau bisa di gratiskan," ucapnya.

Politikus Golkar ini mengimbau, Pemkab Berau untuk menggaet dan memberdayakan UMKM di Bumi Batiwakkal. Jangan sampai, kata Elita, masyarakat merasa dirugikan dengan beban sewa yang besar dan justru tidak sebanding dengan pemasukannya kedepan.

"Nanti kami akan memanggil OPD terkait bagaimana mekanisme dilapangan, setidaknya tenda bisa gratis," tutupnya. (adv/dez)



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

Dorong Peningkatan SDM Bidang Kesehatan

TANJUNG REDEB - Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dinilai penting Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus lebih maksimal dalam menggelar pelatihan bagi tenaga kesehatan. "Tenaga kesehatan saat ini masih kurang, maka perlu gebrakan. Pelatihan harus dimaksimalkan, agar SDM di bidang kesehatan meningkat," katanya.

Dirinya menyebut, keilmuan kesehatan setiap tahunnya ada perubahan atau penemuan terbaru. Dengan menggiatkan seminar atau pelati-

han, tentu memberikan pembaharuan wawasan dan meningkatkan SDM yang ada.

Selain itu, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga mendorong Kabupaten Berau lebih maju lagi. "Dilihat dari kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan. Belum lagi, SDM kurang mumpuni. Maka, peningkatan kualitas SDM sangat perlu dilakukan," jelasnya.

Usulan seminar pelatihan, didorong Peri bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan dari banyaknya fasilitas kesehatan di Bumi Batiwakkal, belum mampu memberikan pelayanan maksimal. Sehingga, para pasien terpaksa harus dirujuk.

"Ini sedikit dikit rujuk, artinya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) masih banyak SDM yang belum mumpuni," bebarnya.

Politikus Gerindra ini berharap, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih akan kurangnya SDM di Kabupaten Berau.

Terlebih, kesehatan merupakan faktor utama penggerak kemajuan suatu daerah. "Suatu daerah akan maju jika SDM-nya bagus. Kalau hanya mengandalkan sumber alam, pastinya akan habis nantinya. Maka, perlu sektor lain untuk menunjang Kabupaten Berau," tandasnya. (adv/dez)



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

Picu Peningkatan PAD, Harap Kontribusi BUMD

TANJUNG REDEB - Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta legislatif untuk berkontribusi.

Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang menuturkan, PAD dari BUMD belum menyentuh angka 10 persen dari jumlah APBD.

"Jadi hal itu perlu ditingkatkan, kontribusi BUMD untuk menyumbang PAD masih rendah," katanya.

Diketahui, Berau memiliki tiga BUMD, yakni PT Indo Pusaka Berau (IPB), Perumda Batiwakkal, dan juga PT Hutan Sanggam. "Ketiga perusahaan tersebut belum diketahui secara jelas berapa sumbangannya terhadap PAD," jelasnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar tersebut mendorong perusahaan

yang dinaungi BUMD untuk turut kontribusi dan berperan aktif dalam peningkatan PAD Kabupaten Berau.

"Jadi saya dorong kepada BUMD untuk saling kontribusi demi kemajuan pembangunan Daerah kita," bebernya.

Di sisi lain, Ratna juga meminta untuk OPD bisa berinovasi dalam mengembangkan PAD. Termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau. Pasalnya pariwisata Berau digadang-gadang menjadi sumber pengganti batu bara yang selama ini masih bercokol di posisi pertama sebagai penyumbang PAD terbesar yakni 64 persen.

"Masuknya IKN ini dan Berau dinugerahi wisata yang indah. Harusnya bisa menjadi momen kebangkitan," tuturnya.

Ia juga meminta Disbudpar agar tidak selalu merengek soal minimnya anggaran. Namun harus bisa memberi inovasi agar mendapatkan bantuan anggaran dari provinsi maupun pusat.

"Harus bisa inovasi. Jangan selalu bersandar pada minim anggaran," ucapnya.

Inovasi dalam pembangunan pariwisata perlu gencar dilakukan. Begitu juga untuk sosialisasi. Event yang masuk dalam kalender pariwisata perlu dibenahi. Dan ditambah inovasinya. Agar masyarakat bisa juga menikmati.

"Banyak yang harus dibenahi. Saya harap OPD lainnya juga turut memberikan kontribusi untuk PAD," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ekti Imanuel

Ekti Sebut Rencana Pembangunan 2000 Sambungan Listrik Belum Cukup Aliri Seluruh Desa di Kaltim

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ekti Imanuel mengusulkan pembangunan 10 ribu titik sambungan listrik yang bisa difokuskan ke kawasan desa tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Meskipun pada tahun 2024 nanti, Pemprov Kaltim sebutnya, berencana untuk membangun 2 ribu sambungan listrik. Namun ujarnya, hal ini belum cukup untuk mengaliri seluruh desa di Bumi Etam.

"Rencana tahun depan, membangun dua ribu sambungan listrik langsung pada tahun 2024 sudah ada, tapi menurut saya, belum cukup," ucap Politisi Gerindra ini.

Berdasar data Pemprov Kaltim jumlah desa dan kelurahan di Benua Etam mencapai 1.038. Dari jumlah tersebut, sebanyak 851 desa/kelurahan sudah tersambung listrik PLN maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Sementara, masih ada 187 desa yang belum teraliri listrik. Isran mengatakan, untuk tahun ini, ditargetkan sebanyak 32 desa akan kembali tersambung dengan listrik PLN maupun menggunakan PLTS.

Mengingat hal ini Ekti berharap ada program dari Pemprov Kaltim yang betul-betul menekan angka desa yang belum teraliri listrik. Ia

menyebut, salah satu program yang sedikit banyak membantu PLN yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sudah mencakup desa-desa tertinggal.

"Program pemasangan listrik berpotensi memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa terpencil Kaltim," terangnya.

"Adanya program PLTS, beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PT PLN dapat tercover. Ini juga langkah yang positif," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRD Kaltim)**



Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin

Udin Nilai Era Isran-Hadi Banyak Persoalan yang Belum Tuntas

SAMARINDA - Masa jabatan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim telah berakhir pada tanggal 30 September 2023 lalu. Kepemimpinan mereka kemudian dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yakni Akmal Malik.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim M. Udin, selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, sejumlah permasalahan dianggapnya belum terselesaikan, seperti yang terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

"Beliau juga menyadari masih banyak masalah selama lima tahun menjabat; tentu hal ini perlu menjadi koreksi," ujar Politisi Golkar ini.

Misalnya, menurutnya, salah satu aduan masyarakat di Kabupaten

Berau, di mana seseorang harus menempuh jarak 7 km hanya untuk bersekolah, padahal ada sekolah yang jaraknya hanya 350 meter dari kediamannya.

Dari segi ketenagakerjaan, katanya, penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

Ia berharap Pemprov Kaltim membuat pelatihan-pelatihan dan wadah untuk mengasah keterampilan bagi anak-anak muda yang ingin bekerja. "Kalau kita tidak berbenah dari sekarang, maka kita akan ketinggalan," ucap Udin.

Belum lagi berbicara mengenai infrastruktur seperti jalan di Kaltim yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Menurutnya, banyak ruas jalan di Kaltim yang mengalami ker-

usakan seperti jalan Samarinda – Kutai Barat, Samarinda – Bontang, Berau – Tanjung Redeb, Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun. Ia menduga bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh banyaknya aktivitas kendaraan operasional perusahaan sawit dan batu bara yang mengganggu jalan umum.

"Salah satu penyebabnya tambang ilegal karena setiap koridor tampak melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita, termasuk aparat kita juga," tegasnya.

Dengan beberapa hal yang dianggapnya belum terselesaikan tersebut, ia berharap Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dapat mengatasi permasalahan yang masih terbuka semasa kepemimpinan Isran-Hadi. **(Eky/adv/dprd Kaltim)**



HUT Bankaltimtara, DPRD Kukar Dorong Lakukan Inovasi Peningkatan Pelayanan ke Masyarakat

TENGGARONG - Banyak harapan disampaikan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, kepada Bankaltimtara, pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58, yang jatuh pada Senin (16/10/2023). Orang nomor satu di DPRD Kukar tersebut, menginginkan adanya peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Rasid mengatakan, Bankaltimtara sebagai perbankan plat merah dan didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kukar), bisa memberikan pelayanan prima. Salah satunya dengan memberikan jami-

nan perkreditan yang murah, cepat dan terjangkau.

"Harapannya dengan HUT Bankaltimtara, dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kutai Kartanegara," ujar Rasid.

Tentunya manajemen Bankaltimtara harus terus bisa meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan ke masyarakat. Agar bisa bersaing secara sehat dengan bank swasta maupun bank plat merah lainnya.

Terbaru, bersama Pemkab Kukar merilis program dedikasi Kukar Ida-

man. Yakni Kredit Kukar Idaman (KKI) untuk petani, pembudidaya ikan dan nelayan. Setelah sebelumnya pada 2021 lalu merilis KKI yang menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini dianggap sukses untuk memenuhi permodalan masyarakat Kukar dengan pinjaman maksimal dan bunga 0 persen. Dengan harapan masyarakat tidak terjerat dengan pinjaman yang berasal dari rentenir. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Bantu Perekonomian Masyarakat, DPRD Kukar Dorong Sektor Swasta Siapkan Pasar Murah

TENGGARONG - Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2023, disambut antusias masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya Tenggarong dan sekitarnya. Bahkan apresiasi pun dilontarkan langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Yang turut hadir dalam pencaanangan program se-Indonesia tersebut.

Ia menyampaikan, pada prinsipnya memang menyambut baik langkah pemerintah dalam menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat Kukar. Hal ini, sedikit banyak dapat membantu kondisi perekonomian masyarakat yang bisa dikatakan sulit saat ini.

"Hal-hal seperti ini harus bisa juga diinisiasi dengan pihak-pihak swasta yang lain. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini membantu ekonomi masyarakat kita," ucap Rasid, Senin (16/10/2023).

Bersamaan dengan GPM 2023, Pemkab Kukar pun kembali merilis Kredit Kukar Idaman (KKI). Yakni dengan menyasar petani, nelayan dan

pembudidaya ikan. Setelah sebelumnya menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh para petani dan nelayan kita," lanjutnya.

Ia berharap program KKI yang diluncurkan oleh Pemkab Kukar, berdampak besar dalam permodalan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di Kukar. Sehingga mereka tidak lagi harus terjerat dengan para rentenir, yang sangat merugikan dan mencekik para nelayan, pembudidaya ikan dan petani.

Namun, ia pun tetap berharap Pemkab bisa turut melakukan pengawasan dengan baik dan teliti kepada calon penerima. Sehingga pemanfaatannya bisa maksimal dirasakan, dengan harapan usaha para penerima bisa berkembang pesat. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi para petani dan nelayan mengembangkan pertanian mengembangkan usaha-usaha perikanan yang ada di Kukar," pungkas Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i



ISTIMEWA

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid



HANAFI/MEDIAKALTIM

Seorang Pengunjung Melihat Foto Bersejarah Kota Samarinda.

Edy: Jangan Lupakan Sejarah Kota Samarinda

SAMARINDA- Ingatlah pidato presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang mengatakan, "Jangan lupakan jejak-jejak sejarah" (Jasmerah). Isi pidato ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah. Apa yang telah kita capai di masa lampau adalah awal dari perjalanan menuju apa yang akan kita capai sekarang dan menjadi bekal untuk masa depan.

Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda memamerkan foto-foto bersejarah yang menggambarkan kehidupan Kota Samarinda di masa lalu serta sejarah kepemimpinan Kota Samarinda dari Walikota Pertama hingga Walikota saat ini.

Foto-foto ini dipajang di Lantai 2 gedung Layanan Perpustakaan Kota Samarinda yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa. Foto-foto tersebut dipajang di sudut ruangan.

"Kami sengaja memajang foto-foto ini agar generasi kita tahu tentang sejarah Kota Samarinda melalui gambar-gambar ini," ungkap Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi.

Foto-foto yang dipamerkan juga mencakup sejarah Presiden pertama Soekarno saat berkunjung ke Kota Samarinda menggunakan pesawat amfibi yang mendarat di air.

"Ini adalah foto saat Presiden pertama Soekarno mendarat di Bandara pertama milik Indonesia, yaitu Sungai Mahakam, karena saat itu Kota Samarinda belum memiliki bandara konvensional. Dia kemudian disambut dan dijemput menggunakan speedboat baru sebelum merapat di dermaga," jelas Edy.

Edy mengakui bahwa masih ada beberapa foto yang belum terpajang.

Dia berharap tahun depan dapat melengkapinya.

"Masih ada beberapa foto Wakil Walikota yang belum terpajang, semoga tahun depan kami bisa melengkapinya dan menambah koleksi foto-foto ini," katanya.

Dengan dipamerkannya foto-foto bersejarah ini, Edy berharap bahwa generasi milenial dan Generasi Z akan lebih mengenal sejarah para pemimpin Kota Samarinda serta memahami sejarah Kota Samarinda.

"Kami berharap bahwa anak-anak muda kita akan memahami sejarah Kota Samarinda dan para pemimpinnya melalui foto-foto bersejarah ini, dan tidak melupakan Jasmerah," tutupnya. (ADV/Han/DPKD)

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



DPMPTSP Bontang Tingkatkan Pelayanan dengan Penyusunan Standar Baru

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan kegiatan Focus Discussion Group (FGD) dalam rangka Penyusunan Kajian Standar Pelayanan DPMPTSP, Kamis (12/10/2023).

Sub Koordinator Bidang Ekonomi DPMPTSP Kota Bontang, Natalia Santi Kanan, menjelaskan bahwa sebuah unit layanan wajib untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar ini akan menjadi tolak ukur penyelenggaraan layanan bagi pelaksana dan pengguna layanan.

"Komponen ini akan menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan dan mengukur kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di unit pelayanan publik,"

ungkapnya.

Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pengguna layanan dan kemajuan pengetahuan, informasi, dan komunikasi. Dari sudut pandang penyelenggara pelayanan publik, ada keinginan untuk memperkaya ragam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta senantiasa meningkatkan kualitasnya.

Adapun tujuan dari penyusunan kajian standar pelayanan ini adalah untuk menyusun standar pelayanan perizinan dengan baik dan konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku, menetapkan standar pelayanan perizinan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan baik penyelenggaraan maupun penggunaan layanan DPMPTSP, dan mener-

apkan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP.

"Setiap tahun kami selalu melakukan peningkatan, dan tahun ini ada izin yang ditarik ke sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Jadi, ada layanan yang dikelola oleh daerah dan ada layanan yang ditangani oleh daerah," jelasnya.

Oleh karena itu, sebelum disahkan oleh Kepala DPMPTSP, dilakukan FGD terkait hasil rapat dan kerjasama dengan Universitas Mulawarman untuk rapat akhirnya, sehingga dari 85 ketentuan standar pelayanan turun menjadi 51 saja. **(sya/adv)**

Peringati Hari Pangan Sedunia, Pemkab PPU Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat Tahap II di Babulu

PPU - Peringati Hari Pangan Sedunia ke-43 yang digelar secara serentak dalam Gerakan Pangan Murah di 441 titik di tanah air. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu daerah yang dipilih oleh Pemprov Kaltim dalam menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), Senin (16/10/2023).

Dalam kegiatan itu, Pemkab PPU sekaligus dilaksanakannya Lanching Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Pusat (CPP) Tahap II. Yakni dengan menyalurkan beras dalam periode Oktober 2023 di wilayah Kecamatan Babulu.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan kegiatan ini yang pertama dilakukan di Kabupaten PPU. Adapun beras CPP yang didistribusikan ini diperuntukkan bagi 2.889 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Hari ini kita bersama seluruh unsur pemerintah Provinsi, Pemkab PPU dan Forkopimda dan lintas sektor terkait melaunching distribusi cadangan pangan pemerintah pusat tahap II. Yang hari ini masing-masing memperoleh 10 kilogram beras selama tiga bulan serta jumlah yang disalurkan di Kecamatan Babulu sebanyak 86,7 ton," ungkapnya.

Makmur menerangkan dasar kegiatan ini dilakukan ialah guna menjaga stabilitas pangan dan inflasi nasional. Termasuk dilakukannya gerakan pangan murah dengan sejumlah komoditas pangan yang ada kepada masyarakat.

"Kegiatan pangan murah ini adalah suatu langkah dalam upaya melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, dengan menggandeng semua pihak terkait tanpa terkecuali. Karena ini adalah kunci dalam menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga harga pangan yang berdampak dengan pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan arahan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Oleh karena, pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutu-

han baik bagi masyarakat. Khususnya yang berstatus miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.

"Adanya Gerakan Pangan Murah ini ialah untuk membantu masyarakat

agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, dibawah harga pasar serta menjaga ketersediaan bahan pangan," tutupnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat pelepasan CPP di Kecamatan Babulu, Senin (16/10/2023).



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU saat meninjau langsung pelaksanaan tes urine.

Ratusan Pegawai Pemkab PPU Jalani Tes Urine

PPU-Ratusan pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Setkab Penajam Paser Utara (PPU) jalani tes urine. Kegiatan itu digelar usai pelaksanaan apel pagi, Senin, (16/10/2023).

Tes urine ini digelar sesuai himbauan langsung Pj Bupati PPU, Makmur Marbun melalui Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU. Dalam pelaksanaannya, ia juga langsung memantau jalannya tes urine yang digelar di Aula lantai I kantor bupati PPU ini.

"Melalui kegiatan ini, dalam rangka memastikan bahwa tidak ada pega-

wai di lingkungan Pemkab PPU yang terlibat narkoba," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada pegawai yang menggunakan narkoba. Hal itu rencananya juga akan dilakukan sebulan sekali atau setiap dua bulan sekali.

"Saya juga rencana nanti akan melakukan tes urin berkala apakah setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali," ungkapnya.

Selain itu, Makmur tidak ingin ada perangkatnya yang terjerat dengan penyalahgunaan narkoba. Jika ada yang didapatkan maka ia akan langsung menyerahkan untuk di-

proses hukum.

Seperti diketahui, sebelumnya juga ada balai rehabilitasi untuk para korban narkoba, hasil kerjasama Pemkab PPU dan Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU. Balai tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung PPU dan Rumah Sakit Pratama Sepaku.

"Korban penyalahgunaan narkoba, bisa direhabilitasi medis dan sosial di tempat tersebut. Juga dimaksudkan sebagai pencegahan bertambahnya jumlah pengguna narkoba," tutup Makmur. (ADV/SBK)



Capai 10.000 Transaksi per Bulan, Borneo Online Store jadi Marketplace Lokal Unggulan Kaltim

BONTANG - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) yang merupakan produsen pupuk urea terbesar di Asia Tenggara, terus berkomitmen untuk mengembangkan perusahaan yang berkelanjutan, tidak hanya dari segi bisnis, namun juga dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek.

Salah satu upaya yang dibangun oleh Pupuk Kaltim dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat adalah melalui inisiasi marketplace lokal, yaitu Borneo Online Store (Borneos.co). Marketplace ini menjadi salah satu pilar ekonomi digital di Bontang, Kalimantan Timur, yang fokus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Borneo Online Store, yang mulai beroperasi pada tahun 2022, telah berhasil menjalin kerja sama dengan 399 mitra UMKM lokal. Ini adalah bukti nyata komitmen Pupuk Kaltim

dalam mendukung pengembangan UMKM lokal dengan memberikan para pelaku usaha platform yang kuat untuk berjualan dan mempromosikan produk secara daring. Berkat sinergi ini, Borneo Online Store telah mencatatkan lebih dari 10.000 transaksi per bulannya.

Marketplace Borneos.co sendiri merupakan hasil pengembangan dari program Bazar Online yang pertama kali digagas oleh Pupuk Kaltim. Program ini dicanangkan untuk membantu pelaku UMKM untuk dapat tetap beroperasi dan menghasilkan pendapatan saat pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas di masa pandemi Covid-19. Melihat kesuksesan program Bazar Online, Pupuk Kaltim melihat potensi lebih besar yang bisa dimanfaatkan, dan itulah awal mula lahirnya Borneo Online Store.

Sugeng Suedi, Vice President Tang-

gung Jawab Sosial dan Lingkungan Pupuk Kaltim, mengungkapkan, "Borneos.co lahir sebagai wadah bagi UMKM lokal di wilayah Bontang, Kalimantan Timur untuk dapat mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan potensi penjualan produk-produk lokal bagi para pelaku usaha. Kami melihat pentingnya memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin berwirausaha agar tetap produktif dan berpenghasilan. Alhamdulillah, dengan capaian positif yang berhasil diraih hingga saat ini, kami berharap bisa terus mendukung pelaku UMKM untuk semakin go digital melalui layanan Borneos.co."

Borneos.co bukan hanya tentang menjalankan bisnis semata, namun juga memberikan layanan yang dapat mencerminkan komitmen Pupuk Kaltim dalam mendukung visi dan misi Kota Bontang untuk memajukan kapabilitas pelaku usaha lokal

agar lebih unggul dan tangguh dalam memasuki ekonomi digital. Bontang, sebagai salah satu kota yang bersemangat untuk tumbuh dan berkembang, tentunya membutuhkan solusi seperti Borneos.co dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Salah satu faktor kesuksesan utama Borneo Online Store adalah keberagaman produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan lebih dari 3.000 produk unggulan dari berbagai kategori seperti makanan dan minuman, kerajinan dan kriya, retail, fesyen, kesehatan, agrobisnis serta pariwisata. Marketplace ini telah menjadi destinasi utama bagi masyarakat Bontang untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian.

Produk dengan kategori makanan dan minuman menjadi pilihan produk yang paling diminati oleh masyarakat Bontang ketika mengakses Borneos.co. Tidak hanya itu, Borneo Online Store juga berkolaborasi den-

gan para kurir lokal dengan tujuan agar dapat memastikan pengiriman produk yang cepat dan efisien kepada pelanggan sekaligus membuka peluang kerja dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal.

Tak hanya menawarkan platform bagi UMKM untuk bersaing di dunia digital, Borneos.co telah menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan secara aktif memberdayakan UMKM di Bontang. Kedepannya, Borneo Online Store ini diharapkan dapat berkembang lebih besar lagi dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas tidak hanya di kota Bontang, namun di kota lain baik di wilayah provinsi Kalimantan Timur maupun tingkat nasional.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, Borneos.co bukan hanya sebuah marketplace, melainkan sebuah kisah sukses kolaborasi antara masyarakat, sektor industri

seperti Pupuk Kaltim bersama dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pupuk Kaltim telah membuktikan bahwa bisnis dapat berperan lebih dari sekadar mencari keuntungan, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan pencapaian transaksi yang terus meningkat, Borneos.co adalah bukti nyata bahwa ketika komitmen dan kolaborasi terjalin, impian memajukan ekonomi lokal dapat menjadi kenyataan.

"Borneo Online Store dan Pupuk Kaltim telah membuka jalan bagi UMKM di Bontang untuk meraih sukses dalam ekonomi digital, dan ini adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Semoga pencapaian ini akan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi lokal yang lebih tangguh dan inklusif," tutup Sugen. (ADV)



PEMBERITAHUAN
BERIKUT DIINFORMASIKAN PELAYANAN KLINIK YANG TUTUP

KLINIK KONSERVASI GIGI

TUTUP

TANGGAL 16 - 18 OKTOBER 2023

BUKA KEMBALI PADA:
HARI KAMIS, 19 OKTOBER 2023

0815 456 00006 Rsud Taman Husada rsudbontang rsud.bontangkota.go.id

Poliklinik Konservasi Gigi RSUD Tutup 3 Hari

BONTANG – Poliklinik konservasi gigi RSUD Taman Husada menutup sementara pelayanannya selama 3 hari sejak tanggal 16-18 Oktober 2023. Manajemen RSUD mengumumkan akan kembali membuka pelayanan di tanggal 19 Oktober 2023.

Tri Ratna Paramita, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik menjelaskan, poliklinik konservasi gigi ditutup sementara lantaran adanya dokter yang mengikuti pelatihan.

“Dokter spesialisnya sedang mengikuti pelatihan, sehingga ti-

dadak ada yang bisa membackup untuk menggantikan dokter tersebut, karena dokternya hanya ada satu,” ungkapnya saat diwawancarai redaksi Radarbontang.com, Senin (16/10/2023).

Ratna juga menjelaskan, untuk setiap dokter memiliki perannya masing-masing. Dari dokter bedah mulut hingga dokter gigi anak, mereka tidak bisa digantikan, karena memiliki peran masing-masing.

“Untuk layanan konservasi gigi tidak bisa digantikan semisalnya den-

gan dokter gigi anak atau dengan bedah mulut, atau yang lainnya. Karena pastinya ilmu yang berbeda-beda, memiliki peran masing-masing, serta mempunyai keahliannya tersendiri,” paparnya.

Selain karena dokter yang sedang ada kegiatan, alasan lainnya apabila poliklinik tutup disebabkan ada dokter yang sedang mengambil cuti. Mulai dari cuti tahunan, cuti dengan alasan yang sangat urgent, bahkan cuti sakit. Itu merupakan hak bagi seluruh karyawan tentunya. (adv/dwi)



RSUD Bontang Memperluas Layanan Kesehatan dengan 24 Poliklinik

BONTANG- Pada tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bontang di Jalan Letjen S. Parman, Nomor 01 ini telah memiliki 21 poliklinik. Pada tahun 2022, terjadi penambahan tiga poliklinik, yaitu Konservasi Gigi, Ortopedi, serta Lepra.

Tri Ratna Paramita, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, mengungkapkan bahwa sejak penambahan poliklinik pada tahun 2022, hingga saat ini di tahun 2023 belum ada penambahan poliklinik baru.

"Iya, penambahan klinik ini terjadi pada tahun 2022, yaitu klinik konservasi gigi, ortopedi, atau yang dimaksud dengan pembedahan tulang, dan lepra, yang merupakan pemeriksaan patologi anatomi. Sebenarnya lepra ini bukan klinik, hanya saja pelayanan untuk diagnosis. Pemeriksaan ini melibatkan pengamatan jaringan tubuh dan cairan tubuh dengan menggunakan alat mikroskop, untuk melihat sel-selnya dan mendeteksi keberadaan sel ganas," ungkapnya saat diwawancarai Mediakaltim.com, Senin (16/10/2023).

Secara keseluruhan, dari tahun 2022 hingga 2023, belum ada penambahan poliklinik baru, dan pelayanan tetap berjalan. Namun, terjadi perpindahan sebagian poliklinik ke gedung B dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pasien.

"Hingga saat ini, pada tahun 2023 belum ada penambahan poliklinik. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Namun, beberapa poliklinik telah berpindah ke gedung B," sebutnya.

Misalnya, dokter gigi yang awalnya berada di satu

tempat kini memiliki ruangan masing-masing. Dokter spesialis juga telah memiliki ruangan tersendiri. "Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan menghindari perpindahan dokter saat pemeriksaan karena keterbatasan tempat dan kursi gigi," tutupnya.

Penulis: Dwi S

Editor: Yusva Alam



Tri Ratna Paramita, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Bontang.



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From **Rp 15.000** nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Keju



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Proses Pemusnahan Barang Bukti Sabu dan Pil Ekstasi.

Polda Kaltim Musnahkan Sabu dan Pil Ekstasi

BALIKPAPAN - Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Kaltim melakukan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan dari dua pelaku berinisial AR (26) dan RI (27) yang ditangkap di Kota Samarinda pada akhir September dan awal Oktober 2023 lalu.

Pamin Binops Ditresnarkoba Polda Kaltim, Iptu Wariston Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus ini lebih dulu menangkap tersangka AR di Kecamatan Samarinda Kota dengan barang bukti sabu sebanyak 90,06 gram.

"Tersangka ditangkap akhir Sep-

tember di Kecamatan Samarinda Kota dan saat digeledah ditemukan barang bukti 2 poket sabu masing-masing sebanyak 50,32 gram dan 47,74 gram," ujarnya Senin (16/10/2023).

Lebih lanjut, Wariston menjelaskan, untuk tersangka kedua, RI ditangkap di Kecamatan Samarinda Ulu pada awal Oktober 2023 lalu. "Pengungkapan kasus kedua dengan tersangka RI, barang buktinya berupa 20 butir pil ekstasi," jelasnya.

Setelah dinyatakan berkas dan pemeriksaan lengkap, polisi pun melakukan pemusnahan barang

bukti hasil kejahatan keduanya, yakni sabu dan pil ekstasi diblender dan ditumpahkan ke dalam kloset.

"Namun ada yang kita sisihkan untuk keperluan barang bukti di persidangan. Untuk sabu 0,5 gram dan pil ekstasi 2 butir," tambahnya.

Setelah proses pemusnahan barang bukti ini, tersangka dan berkas akan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan untuk segera dilakukan persidangan. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



radar.

MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballkpapan.com



Asisten III Setdaprov Kutai Barat Sahadi (Berdiri nomor dua di sebelah kanan) didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Rion saat memberikan beras/sembako secara simbolis kepada salah satu perwakilan masyarakat di Barong Tongkok.

Dinas Ketahanan Pangan Kubar Gelar Pasar Murah di 5 Kecamatan Tahap Pertama

KUTAI BARAT - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan mengadakan gerakan pangan murah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah dan berlangsung di halaman kantor Kutai Barat, tepatnya di kompleks perkantoran Pemkab Kubar, Kecamatan Barong Tongkok, pada Senin (16/10).

Bupati Kutai Barat, melalui Asisten III Setdaprov Kubar, Sahadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan sehingga masyarakat dapat membeli pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. "Kegiatan yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama di tengah lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan di pasar," ucapnya.

Hal ini karena kondisi perekonomian menghadapi tantangan berat akibat dampak inflasi. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk berhemat dalam pengeluaran keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bupati Kutai Barat juga menyampaikan pesan tertulis kepada seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas terkait hingga pemerintah kampung, untuk mengawasi dan mendukung kelancaran distribusi barang-barang kebutuhan sehingga dapat menjaga ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. "Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada penimbunan barang-barang kebutuhan, terus pantau pemenuhan kebutuhan pasar dan masyarakat, serta awasi alur ekonomi pasar agar situasi tetap kondusif," tegas Sahadi.

Selain itu, partisipasi pelaku usaha, terutama yang beroperasi dalam skala besar, juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.

Mereka juga diharapkan tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan harus menghindari tindakan spekulatif yang dapat merugikan semua pihak.

Gerakan pasar murah diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama menjelang perayaan Natal.

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap di 16 kecamatan. Tahap pertama mencakup 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Nyuatan, Muara Lawa, Damai, Linggang Bigung, dan Barong Tongkok.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat, Rion, menjelaskan bahwa kegiatan ini dimulai dari Kecamatan Nyuatan pada tanggal 10 Oktober 2023, lalu berlanjut ke Kecamatan Muara Lawa pada tanggal 12 Oktober, Kecamatan Damai pada tanggal 14 Oktober, Kecamatan Barong Tongkok pada tanggal 16 Oktober, dan terakhir di Kecamatan Linggang Bigung pada tanggal 17 Oktober 2023.

Rion menambahkan bahwa kegiatan selanjutnya akan menasar ke Kecamatan lainnya dan akan berlangsung hingga mencakup seluruh 16 Kecamatan.

Harga-harga barang kebutuhan yang disubsidi oleh Dinas Ketahanan Pangan kepada masyarakat telah disesuaikan, antara lain:

- Beras Premium 5Kg seharga Rp. 64.000
- Beras SPHP Bulog 5Kg seharga Rp. 51.250
- Minyak goreng satu liter seharga Rp. 16.000
- Minyak goreng dua liter seharga Rp. 32.000
- Telur ayam broiler satu palet seharga Rp. 55.000
- Gula pasir satu Kg seharga Rp. 14.000
- Bawang merah satu kilo seharga Rp. 25.000.

Pewartu: Ichal

Redaktur: Agus Susanto



Bupati Paser, Fahmi Fadli saat menyampaikan nota keuangan.

Bupati Paser Sampaikan Rancangan Nota Keuangan Untuk 2024

PASER - Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dibacakan Bupati Paser, Fahmi Fadli melalui rapat paripurna dihadapan DPRD Kabupaten Paser, Senin (16/10/2023).

Dijelaskan Fahmi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser di 2024 diperkirakan turun 1-2 persen dari tahun 2022 mencapai 1,09 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,00 poin, naik 0,56 dari 2022 yang mencapai 73,44.

“Untuk tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 9,00 persen, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022 mencapai 9,43 persen,” kata Fahmi dalam pidatonya.

Kemudian pada tingkat pengangguran terbuka ditargetkan mencapai 3,94 persen 2024 yang mengalami penurunan dibanding 2022 diangka 4,88 persen. Adapun di 2024 total pendapatan yang direncanakan mencapai Rp 3,9 triliun lebih.

“Rencana pendapatan tersebut meliputi beberapa bagian, meliputi PAD senilai Rp 197,86 miliar, pendapatan transfer Rp 3,1 triliun lebih dan pendapatan daerah yang sah senilai Rp 800 juta,” paparnya.

Diterangkannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 197,86 miliar lebih berasal dari pajak daerah senilai Rp 36 miliar lebih. Retribusi daerah Rp 10 miliar dari hasil pengelolaan kekayaan daerah,

yang dipisahkan Rp 6 miliar lebih dan PAD yang sah Rp 144 miliar lebih.

Pada pendapatan dari dana transfer direncanakan senilai Rp 3,1 triliun lebih. Rinciannya bersumber dari dana perimbangan, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp 2,7 triliun dan pendapatan transfer antar daerah senilai Rp 373 miliar.

“Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 800 juta, semuanya berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ulasnya.

Berdasarkan uraian pendapatan dan penerimaan, kata Fahmi maka kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk membiayai belanja pada anggaran 2024 senilai Rp 3,9 triliun lebih.

Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai belanja operasi senilai Rp 2,04 triliun lebih, belanja modal senilai Rp 1,4 triliun lebih dan belanja tidak terduga senilai Rp 10 miliar serta belanja transfer Rp 393 miliar lebih.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah direncanakan senilai Rp 585 miliar, yang merupakan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran atau SIL-PA tahun sebelumnya yang diperkirakan senilai Rp 600 miliar dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah senilai Rp 15 miliar.

Sementara pada 2024, kata Fahmi akan ada agenda penting nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang

secara serentak dilaksanakan. Ia menilai kedua agenda besar tersebut akan berpengaruh secara ekonomi dan sosial di Kabupaten Paser.

“Konstelasi politik ini memerlukan pencermatan yang mendalam untuk menentukan skala prioritas kebijakan dan pembiayaan, serta penggunaan dana APBD,” terangnya.

Fahmi berharap, semua pihak terkait, agar dalam penentuan alokasi anggaran dan skala prioritas agar bisa benar-benar melakukan penyesuaian dengan isu nasional, baik yang kecil maupun besar membawa dampak terhadap Kabupaten Paser.

Agenda lain yang akan dihadapi pada tahun 2024, rencana Pemerintah Pusat untuk pemindahan jajarannya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sehingga, sebagai penyangga, Kabupaten Paser diminta untuk segera melakukan penyesuaian.

“Kita sebagai salah satu kabupaten penyangga dan mitra strategis IKN, akan tetap melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk yang terkait dengan belanja yang akan memperkuat posisi Paser sebagai kabupaten penyangga,” tandas Bupati Paser.

Fahmi juga mengharapkan agar Banggar DPRD Kabupaten Paser dan TAPD Paser, agar segera mengagendakan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Paser tahun anggaran 2024 menjadi Perda dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (bs)



ROBBI/MEDIA KALTIM GROUP

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor (kiri), saat mendampingi Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, saat meninjau gelaran pasar murah di Babulu, pada hari Senin, 16 Oktober 2023.

Syahrudin Apresiasi Gerakan Pangan Murah Pemkab PPU

PPU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemkab PPU pada Senin, 16 Oktober 2023.

Langkah ini dianggapnya sebagai upaya positif mendukung produksi lokal dan mengendalikan tingkat inflasi di wilayah tersebut.

Syahrudin mengakui bahwa penyelenggaraan pasar murah adalah langkah yang penting untuk mengantisipasi potensi inflasi. Ia menekankan perlunya upaya keras dari pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat inflasi secepat mungkin, dan pasar

murah menjadi salah satu tindakan konkret dalam meredam inflasi.

"Gerakan pasar murah ini adalah langkah antisipatif kami di PPU untuk mencegah terjadinya inflasi akibat pasokan dari luar," katanya.

Pasar murah ini diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten PPU. Selain mempromosikan kesadaran masyarakat untuk membeli produk lokal, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi, yang tetap menjadi perhatian utama pemerintah pusat.

Menurut Syahrudin, pemerintah daerah harus bergerak nyata di lapangan. Menurutnya, penyelenggaraan pasar murah seperti ini akan mem-

bantu menstabilkan harga-harga di pasar dan mengurangi tingkat inflasi.

"Dengan Gerakan Pasar Murah ini, kami berharap dapat menciptakan stabilitas harga di PPU," ujarnya.

Selain itu, Syahrudin juga mendorong seluruh elemen masyarakat di PPU untuk mendukung dan mengonsumsi produk beras lokal. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung produksi lokal.

"Langkah proaktif seperti operasi pasar atau bursa pangan murah menjadi salah satu solusi cepat dalam mengatasi lonjakan harga," tambah Syahrudin. (SBK)



Dari Kanan, Rachmawati Bersama Anak-Anak Didiknya di TBM Iqro.

TBM Iqro dengan Segudang Prestasi

SAMARINDA - Rachmawati dan Taman Baca Masyarakat (TBM) Iqro yang dimilikinya telah mengumpulkan sejumlah prestasi mulai dari tingkat Pemerintah Kota Samarinda hingga tingkat Nasional.

Dalam catatan yang terdapat di situs web TBM Iqro yang berdiri sejak tahun 2015, prestasi-prestasi telah diraih sejak tahun 2017. Prestasi tersebut melibatkan Rachmawati secara individu, Lembaga TBM Iqro, dan bahkan anak-anak didik TBM Iqro.

Rachmawati menyatakan kebahagiaannya atas semua prestasi ini, baik yang diraih secara individu maupun oleh Lembaga TBM Iqro dan anak-anak didiknya. Hal ini tentu tidak lepas dari usaha Rachmawati dalam mempromosikan budaya literasi, terutama di kalangan anak-anak sekolah di sekitar TBM.

"Kegiatan di TBM Iqro rutin diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu,

dengan partisipasi sekitar lima-puluh anak didik. Pada hari Minggu, biasanya menjadi waktu yang paling ramai. Kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan mencakup berbagai aktivitas seperti membaca buku, membaca puisi, mendongeng, dan menari," jelas Rachmawati.

Rachmawati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap semua TBM yang ada di Kalimantan Timur.

"Kami berharap agar Dinas Pendidikan dapat memberikan bimbingan dan perhatian yang lebih, terutama dari pemerintah provinsi, dan semua ini dapat didukung oleh Dinas Provinsi," katanya.

Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Rachmawati termasuk Juara 1 dalam pembuatan alat peraga pendidikan tingkat Kota Samarinda pada tahun 2017, Juara 3 dalam kompetisi vlogger dari Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara pada tahun 2018, Juara 1 sebagai pengelola TBM tingkat Kota dan Kalimantan Timur pada tahun 2021, dan yang terbaru adalah menerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka pada tahun 2023, selain masih banyak prestasi lainnya.

Sementara itu, prestasi yang diraih oleh Lembaga TBM Iqro termasuk menjadi TBM yang menciptakan buku cerita bergambar terbaik tingkat Kota Samarinda pada tahun 2018.

TBM Iqro terletak di Jl. Joyo Mulyo Gg. Atthoriq, RT. 37/RW. No. 61, Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Tempat ini berada di rumah pribadi Rachmawati yang juga ditempati bersama keluarganya. **(Han)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kencana No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



113 PEGAWAI IKUTI ORIENTASI PPPK DI KALTIM,
**TINGKATKAN
KOMPETENSI ASN**



BPSDM KALTIM GELAR ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1445 H



SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, bertempat di Aula Utama BPSDM Provinsi Kaltim, Selasa (10/10/23).

Agenda ini merupakan agenda rutin yang digelar oleh BPSDM Kaltim. Sebagai wadah ikhtiar untuk terus mengenang dan mencintai Nabi Besar Muhammad SAW tauladan umat Islam seluruh dunia.

Acara dirangkai dengan mendengarkan sari tilawah Qur'an dan dilanjutkan dengan ceramah keagamaan Islam, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengajak kepada seluruh pegawai yang hadir untuk meneladani akhlak Rasulullah.

"Melalui peringatan ini harapan kita adalah semua bisa mengenang kembali sejarah perjuangan

beliau. Dalam hal ini kita juga ingin mengambil pelajaran dari kegiatan ini terutama bagaimana kita bisa melihat sifat mulia yang juga merupakan momentum yang sangat baik untuk menjalin silaturahmi yang erat dan juga rasa kebersamaan," ucapnya.

Hal ini dibenarkan oleh Penceramah Guru Achmad Zaini. Ia menyampaikan, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setidaknya ada 4 amal atau kebiasaan yang bisa dilakukan sebagai pintu masuk menuju surga.

"Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah telah memberikan beberapa penjelasan, yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah SWT" ucap Guru Achmad Zaini.

Yang pertama yaitu menebar Salam, Orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah mereka yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Men-

ebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita.

Kedua yaitu Dermawan, Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga, atau mengeluarkan zakat atas harta, Nabi menganjurkan bersedekah, terutama bagi orang yang membutuhkan.

"Mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga." Ujar Beliau

Selanjutnya, yaitu menjalin silaturahmi kepada semua, dan yang keempat adalah menjalankan sholat sunnah di ujung waktu malam.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H ini diikuti seluruh jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di BPSDM Kaltim. **(Han/ADV/BPSDM)**

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari



Dari kanan: Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Nina Dewi, MAP; Kepala BKPSDM Kabupaten PPU, H. Amrullah, SE, MT

113 PEGAWAI IKUTI ORIENTASI PPPK DI KALTIM, TINGKATKAN KOMPETENSI ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah sukses menyelenggarakan Penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang 2 Angkatan 76, 77, dan 78 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kelas Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (14/10/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara, H. Amrullah, SE, MT, beserta stafnya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Kompetensi BKPSDM Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, dalam laporannya, menjelaskan bahwa orientasi PPPK ini telah dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023, dengan diikuti oleh sebanyak 113 peserta yang terdiri dari Tenaga Pengajar dan Penyuluh Pertanian.

Kegiatan ditutup oleh Kepala

la BKPSDM Kabupaten PPU, H. Amrullah, SE, MT, yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan pelatihan, serta menyampaikan terima kasih kepada semua pihak penyelenggara yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga pelatihan dapat berjalan dengan sukses.

Amrullah menekankan pentingnya orientasi ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi. Semua ini bertujuan agar para pegawai pemerintah mampu melaksanakan tugas dan peran mereka sebagai pelayan masyarakat dengan baik.

Lebih lanjut, Amrullah menekankan bahwa di era saat ini, daya saing seseorang dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi orang lain, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Dia meng-

ingatkan bahwa persaingan di masa depan akan semakin ketat, oleh karena itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus mengasah keterampilan dan kemampuan mereka, terutama dalam konteks teknologi.

"Dengan memiliki sumber daya aparatur yang berkualitas, kita dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ungkapnya.

Amrullah juga berharap agar semua peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama orientasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, tepat, terencana, terstruktur, dan terukur.

"Saya berharap bahwa semua peserta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama orientasi ini, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, tepat, terencana, terstruktur, dan terukur," tutupnya. **(Han/ADV/BPSDM)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra. Nina Dewi saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan manajemen bencana.

KEPALA BPSDM : MANAJEMEN BENCANA JADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA

SAMARINDA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nina Dewi menjelaskan pentingnya manajemen bencana tidak dapat dianggap remeh. Karena menyangkut keselamatan nyawa umat manusia.

Hal ini disampaikan oleh Nina Dewi saat memberikan sambutan membuka Pelatihan Manajemen Bencana, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang beberapa waktu lalu.

"Manajemen bencana tidak bisa diabaikan di seluruh dunia. Kita sering kali dihadapkan pada berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri dan

konstruksi," ungkapnya.

Mempersiapkan diri sejak dini, ujar Nina sangat penting dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam manajemen bencana adalah langkah yang bijak untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa manajemen bencana adalah tanggung jawab bersama. Semua individu, komunitas, dan pemerintah memiliki peran penting, dalam menjaga alam agar terhindar dari bencana alam," ujarnya.

Ilmu pengetahuan tentang manajemen bencana diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam upaya manajemen bencana di wilayah kita masing-masing dan akan memberikan gambaran yang komprehensif bagi para peserta diklat mengenai penyelenggaraan penangu-

langan bencana di Indonesia.

Nina yakin bahwa semua peserta akan keluar dari pelatihan ini dengan pengetahuan baru yang berharga dan perspektif yang lebih luas tentang manajemen bencana namun tidak kalah pentingnya. Dia juga tetap berharap bahwa pemerintah provinsi tidak akan pernah menghadapi situasi darurat serius nantinya.

"Namun, dengan persiapan yang baik, kita akan siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Saya berharap pelatihan dasar manajemen bencana ini akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan kita untuk menjadikan masyarakat kita lebih aman dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana," tutupnya. **(Han/ADV/BPSDM)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Dra. Nina Dewi
MAP saat mem-
buka Pelatihan
Dasar Manaje-
men Bencana

PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA BPSDM KALTIM DIKUTI 60 PESERTA

SAMARINDA - Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam penanggulangan bencana, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pelatihan Dasar Manajemen Bencana pada Senin (9/10/2023), di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim, Apriyana Rachmawati mengatakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana diikuti oleh 2 angkatan berjumlah 60 peserta selama 4 hari secara klasikal (tatap muka).

"Jumlah peserta 60 orang terdiri dari 30 orang di Angkatan 1, dan 30 orang di Angkatan 2 yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanggulangan Bencana di Provinsi Kaltim," ujarnya.

Melalui pelatihan ini dapat meningkatkan Kapasitas SDM dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana sep-

erti yang tertuang dalam PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Disebutkan, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi terjadi bencana.

"Selama mengikuti pelatihan, peserta juga diwajibkan untuk menyampaikan evaluasi terhadap materi, pelaksanaan dan fasilitator," pintanya

Dalam sambutan sekaligus membuka acara, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengatakan pentingnya manajemen bencana tidak dapat diabaikan.

"Di seluruh dunia, kita sering kali dihadapkan pada berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan banyak lagi. Selain itu, ada juga bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri," ujar Nina.

Oleh sebab itu menurut Nina, mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan

yang tepat dalam manajemen bencana adalah langkah yang bijak untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat.

"Dengan ini Pelatihan Dasar Manajemen Bencana secara resmi saya buka," ujar Nina.

Diketahui, narasumber Pelatihan Dasar Manajemen Bencana kali ini, berasal dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, dan Widyaiswara BPSDM Kaltim.

Selain peserta acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, Kepala BPBD, Agus Tianur, Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Agus Rubiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU, Riviana Noor, Pejabat Administrator, Widyaiswara, Pejabat Pengawas dan Analis Bangkom di Lingkungan BPSDM Kaltim. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

MEDIA KALTIMTARA

SELASA,
17 OKTOBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

PERSOALAN LIMBAH BUNYU BELUM ADA TITIK TERANG

BACA HALAMAN 2



JAMIN KEAMANAN LAUT PERBATASAN, LANTAMAL XIII GELAR LATIHAN GABUNGAN

BACA HALAMAN 15-16



Persoalan Limbah Bunyu Belum Ada Titik Terang

TANJUNGSEROR – DPRD Bulungan berencana memberikan rekomendasi soal keberadaan perusahaan di Pulau Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Rekomendasi itu lantaran, adanya dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan sering terjadi.

Ketua DPRD Bulungan, Kilat menjelaskan pihaknya peranturun ke lapangan bersama dengan tim pansus untuk mengecek kondidi ril di lapangan. Rekomendasi yang akan diberikan, lantaran tidak adanya itikad baik perusahaan terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat terutama dalam hal pengolahan limbah.

Oleh karena itu, disisi lain DPRD Bulungan meminta ada ketegasan sikap yang diambil oleh pemerintah daerah. Dia memastikan, DPRD Bu-

lungan telah melakukan rapat dengan tim menindaklanjuti apa yang menjadi laporan masyarakat.

”Saat ini tim di DPRD Bulungan tengah menyusun poin yang akan menjadi rekomendasi dewan,” ucap Kilat, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Dikatakan, setelah dikonsepsikan tim pansus akan kembali menggelar rapat untuk membahas poin yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Palsalnya, sebelum rekomendasi itu dikirimkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terlebih dahulu ditembuskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Nantinya, ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi. Salah satunya, meminta pemerintah melakukan langkah konkret terhadap persoalan dugaan pencemaran, berdasarkan

fakta yang ditemukan di lapangan. “Rekomendasi yang akan dikeluarkan, setelah melalui beberapa tahapan seperti negosiasi dengan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi laporan dan keluhan masyarakat,” jelasnya.

Bahwa hasil peninjauan di lapangan, ada beberapa fakta yang ditemukan. Salah satunya, pohon gaharu milik warga yang mati diduga akibat terkena limbah. Bahwa nilai jual gaharu ini lebih mahal dibandingkan tanaman lainnya. Sementara, perusahaan tidak mau tahu terkait hal tersebut. “Kita minta kebijakan perusahaan menyelesaikan ganti rugi terhadap tanam tumbuh milik warga yang mati,” tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

Lampu Penerangan Jalan Umum Harus Merata

TANJUNGREDEB - Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman menyoroti ketersediaan penerangan jalan umum (PJU), yang belum sepenuhnya merata. Bahkan di ruas jalan dalam kota masih ada yang gelap, padahal anggaran untuk PJU ini cukup besar.

“Untuk pengawasan PJU ini belum tahu apakah akan menjadi tanggung jawab Komisi III atau pihak PLN, akan tetapi tahun 2023 ini, anggaran untuk PJU kurang lebih sekitar Rp 20 miliar,

yang realisasinya di anggaran 2024,” terangnya.

Dikatakan Sakirman, Komisi III juga telah melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan OPD siap mengawal kegiatan tersebut. Tinggal menghimpun informasi-informasi ataupun asupan-asupan khusus yang masuk di Komisi III, untuk membantu titik-titik penerangan yang masih gelap.

“Mudah-mudahan itumenjadi alter-

natif penerangan jalan di daerah perkotaan yang mungkin belum ada, karena kemaren ada beberapa permintaan juga dari warga sambaliung arah ke TPI itu gelap sekali dan jalan Diponegoro arah tumpukan pasir,” tambahnya.

Untuk target rampung pemasangan lampu penerangan jalan adalah di Desember 2023. Dan akan terus melakukan pemantauan bagaimana perkembangan pemasangan tersebut. (adv/and)

Dorong Pembangunan Lanjutan Jembatan Muara Lesan

TANJUNG REDEB - Kelanjutan pembangunan Jembatan Muara Lesan di Kecamatan Kelay terus didorong Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut telah dimulai pada tahun 2019 silam, namun terhenti karena keterbatasan anggaran. Terlebih, adanya permintaan dari masyarakat sehingga realisasi pembangunan mesti diprioritaskan pada tahun 2024 mendatang.

Dikatakan Saga, pihaknya telah menyuarakan kelanjutan pembangunan Jembatan Muara Lesan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Karena, selain dari permintaan masyarakat, juga rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan pembangunan yang belum terselesaikan saat melakukan kunjungan beberapa waktu lalu.

“Kita sudah suarakan pada rapat sebelumnya. Hampir 80 persen Badan Anggaran pembangunan jembatan harus tuntas. Belum lagi rekomendasi KPK jangan ada bangunan mangkrak,” terang Saga saat dijumpai di ruang kerjanya.

Dirinya mengaku, pada saat proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama pihak DPUPR telah membahas perencanaan pembangunan Jembatan Muara Lesan sudah.

Hanya saja, ungkap Saga, belum sampai pada pembahasan secara rinci mengenai mekanisme pembangunan jembatan tersebut.

“Nanti saat rapat R-APBD akan dibahas secara rinci bagaimana gambarannya. Mudah mudahan bisa terjawab saat pelaksanaan rapat,” imbuhnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, pembangunan yang belum terselesaikan akan di prioritaskan pada tahun 2024 mendatang.

“Jangan sampai mangkrak lagi. Tahun ini dibangun, belum tuntas tapi tahun berikutnya tidak dianggarkan kembali. Malahan ada bangunan baru,” tandasnya. (adv/and)



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

Minta Pemerintah Perbanyak RTH di Perkotaan

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan.

Ia menilai, dengan adanya RTH di kawasan perkotaan, bisa menjadi solusi memecah polusi dari kendaraan. “Saya sangat mendukung dengan adanya ruang terbuka hijau agar bisa mengurai polusi di perkotaan,” katanya.

Dikatakannya, memang di setiap sudut kota tampak mulai dihiasi dengan ruang terbuka hijau. Hanya saja, masih terdapat beberapa lahan milik pemerintah yang tidak difungsikan secara maksimal.

Namun, dirinya tetap berharap, setiap lahan pemerintah yang memungkinkan dijadikan taman, hendaknya dijadikan taman kota guna menambah estetika keindahan kota juga mengurai polusi. “Disudut sudut ini kan sudah banyak ruang terbuka hijau, harapan kita di perbanyak lagi,” tandasnya. (adv/and)

Apresiasi Gerak Cepat Tim Penanganan Karhutla

TANJUNG REDEB - Tindakan cepat tim penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam menangani kobaran api diapresiasi Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dijelaskan Madri, reaksi cepat ini memang perlu dilakukan sebelum api semakin menyebar dan melahap lahan lebih luas. Bahkan parahnya bisa membakar rumah warga.

“Saya sering lihat ada laporan warga, jam berapa pun mereka langsung berangkat (memadamkan,red),” tuturnya.

Dirinya mengatakan, antisipasi sedini mungkin memang perlu dilakukan, agar penyebaran api bisa diminimalisasi. Di sisi lain, Madri juga menyinggung soal anggaran konsumsi untuk tim karhutla. Ia menuturkan, selama ini mereka merogoh kocek sendiri untuk konsumsi. Tidak sedikit juga warga yang memberikan konsumsi ala kadarnya. Padahal tim karhutla berjibaku berjam-jam memadamkan api tersebut.

“Saya rasa pemkab bisa menganggarkan untuk tahun depan, agar konsumsi terjamin pastinya. Kan mereka juga kadang sampai begadang untuk padamkan kobaran api tersebut,” ucapnya.

Penanganan karhutla, menurut Politikus NasDem ini berbeda dengan kebakaran permukiman. Pasalnya, ilalang yang kering ditambah embusan angin dan cuaca panas, membuat api sangat sulit dipadamkan. Apalagi api dengan cepat menyebar.

“Bisa lah anggaran Berau besar kok. Masa untuk konsumsi tidak bisa, ini kan bencana,” tandasnya. (adv/and)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Sorot Masalah Hubungan Industrial



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

TANJUNG REDEB - Permasalahan hubungan industrial yang menjerat perusahaan dan pekerja, masih banyak terjadi di Berau. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya aduan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong menjelaskan, salah satu kendala terjadinya banyak permasalahan hubungan industrial tersebut yakni kurang adanya diskusi yang baik, terutama antara perusahaan dan pekerja.

Selain diskusi, masing-masing pihak juga belum mampu melepaskan egonya. Hal itu menyebabkan banyak persoalan yang sebenarnya bisa diatasi akhirnya ditunda hingga sukar menemukan kesepakatan.

“Sebenarnya kalau hal-hal yang menyangkut tenaga kerja, hubungan industrial, upah dan sebagainya, harus didiskusikan dengan baik. Jangan karena ego ada yang dirugikan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, jika masalah perselisihan itu pada akhirnya tidak menemui kesepakatan, perlu diselesaikan lewat jalur hukum. Tujuannya agar permasalahan itu bisa mendapatkan penyelesaiannya yang sah.

“Kalau dibawa ke pidana serahkan ke ranahnya. Biar ada keputusan yang sah,” terangnya.

Terkait masalah PHK yang masih banyak dilakukan perusahaan, Rudi meminta hal itu diperhatikan secara serius terutama oleh perusahaan. Sebab, memberhentikan pekerja berdampak luas pada kesejahteraan dan kehidupannya pada masa mendatang.

“Kalau diberhentikan, haknya juga harus diberikan,” tutup Politikus PDI-P ini. (adv/and)



Kabid Pengelolaan DPK Kaltim, Dyayadi

Begini Pentingnya Digitalisasi Pengarsipan Data Pribadi Demi Keamanan

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Samarinda (Kaltim) mengimbau kepada Aparat Sipil Negara (ASN) dan masyarakat akan pentingnya digitalisasi dalam memanfaatkan teknologi sebagai solusi digital dalam pengarsipan.

Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), Dyayadi mengungkapkan, digitalisasi arsip adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi hilangnya data dan arsip berharga akibat bencana alam.

“Sekarang kita harus memanfaatkan

teknologi. Arsip pribadi dan arsip penting yang dikelola perangkat daerah, harus di-scan menjadi bentuk digital. Antisipasi misal terjadi kebakaran, banjir, yang bisa mengakibatkan arsip hilang atau terbakar,” terangnya.

Tak hanya itu, Dyayadi juga mengatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di lingkungan Kaltim disarankan untuk menyimpan arsip-arsip penting dengan baik dan untuk arsip statis bisa disimpan di DPKD Kaltim. Misalnya, seperti surat-surat tanah kepemilikan gedung pemerintah dan surat-surat

penting lainnya yang tidak sering digunakan agar tidak hilang dan jika dibutuhkan bisa menarik kembali berkasnya untuk digunakan.

Dikatakan, warga Samarinda juga dapat memanfaatkan teknologi ini agar menjaga keamanan berkas penting mereka, seperti ijazah, sertifikat, surat tanah, dan dokumen lainnya.

“Para ASN dan masyarakat saya mengimbau, untuk mengamankan berkas-berkas vitalnya. Dengan cara di-scan, lalu unggah ke Google Drive, kan bisa itu agar nanti kalau mau mencari kembali mudah, mencarinya,” tutupnya. (adv/and)

Begini Pentingnya Pengarsipan Arsip Statis dalam Penyelenggaraan Pemerintah

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan terus mengupayakan terciptanya tertib arsip di lingkungan Pemprov Kaltim, salah satunya adalah menampung arsip statis.

Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti menjelaskan Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah. Karena, masih memiliki nilai guna kesejarahan, walaupun telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan UU RI pasal 18 No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, diamanatkan bahwa setiap unit pencipta arsip memiliki tugas melakukan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dalam hal ini adalah DPKD Kaltim.

“Penyerahan arsip tersebut merupakan upaya pengamanan dan pelestarian arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah, bukti keberadaan (evidential), informasional (informational), dan intrinsik (intrinsic) DPKD Kaltim,” ungkap Dewi

Pada umumnya, arsip statis sudah berakhir nilai gunanya sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja bagi unit pencipta arsip namun masih memiliki kegunaan yang lebih luas untuk kepentingan umum sebagai sumber informasi, bahan penelitian dan pembelajaran, atau nilai sejarah.

“Dari arsip kita akan bercerita soal kita dulunya Kaltim dan Kaltara itu satu provinsi, juga sejarah soal otonomi daerah dulu kita belum otonomi sekarang sudah otonomi, atau yang sekarang sejarah soal penetapan IKN, generasi mendatang pasti bertanya catatan sejarah soal penetapan IKN sebagai ibu kota negara Nusantara, yang dulunya ibu kota Indonesia di Jakarta dan sekarang di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Pentingnya pengarsipan oleh penyelenggaraan pengarsipan ada-

lah untuk merawat dan melestarikan arsip, sebagai alat bukti jika terkendala hukum juga sebagai pacuan tolak ukur pedoman kinerja selanjutnya.

“Misalkan ada yang terkendala hukum maka arsip-arsip ini bisa jadi bukti, terus bisa juga dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang inginkan peningkatan target tahun mendatang, otomatis kita melihat kilas kinerja tahun lalu,” ujarnya.

Selain itu juga arsip sebagai sumber bahan penelitian, seperti lembaga mahasiswa, pendidikan lembaga sejarah, Sebagai memori kolektif bangsa sumber sejarah baik itu untuk generasi sekarang juga untuk generasi mendatang.

Lembaga – lembaga yang rajin setiap tahunnya menyerahkan arsip kepada DPKD Kaltim adalah BPKAD, Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Bagian Umum Pemprov Kaltim yang membawahi sembilan biro. “Jadi ada yang sudah dan ada pula yang masih bertahap mengirim arsip statusnya”

katanya.

Dia berharap kepada lembaga perangkat daerah lainnya untuk memanfaatkan tempat arsipnya agar lebih memudahkan pengarsipan.

Bahkan saat ini Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan surat tentang penataan arsip Sekretaris Daerah Kaltim no 005/131726/DPK/V/31 Agustus 2023 mengatakan bahwa penataan pengelolaan arsip di semua perangkat daerah Kaltim, pengelolaan arsip dinamis statis pencipta arsip semua pemerintah di Kalimantan timur, arsip statis yang memiliki nilai guna wajib diserahkan, disimpan dan dilestarikan ke lembaga kearsipan Kalimantan Timur.

“Kita ingin mewujudkan sadar gerakan arsip disemua unit kerja, kiranya nanti setiap lembaga perangkat daerah Kaltim untuk melakukan koordinasi pengelolaan arsipnya ke DPKD Kaltim, kami tunggu,” tutupnya. (adv/and)



Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM



Kepala Bidang Pengelolaan kearsipan Drs. Dyayadi. SSos MT (kiri) dan Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM.

DPK Kaltim Tegaskan Arsip Tak Miliki Nilai Guna Harus Dimusnahkan

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di lingkungan Kaltim sudah memusnahkan ribuan arsip yang tidak memiliki nilai guna.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Drs. Dyayadi. SSos MT saat dikunjungi di ruang kerjanya yang bertempat di Kantor Arsip DPKD Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Kamis (5/10/2023).

Seperti halnya beberapa hari yang lalu, pemusnahan arsip juga sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim yang bekerja sama dengan DPKD Kaltim memusnahkan 6.707 arsip waktu 2007.

Dyayadi mengatakan pemusnahan arsip bertujuan untuk mengurangi jumlah volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. "Arsip tersebut sudah tidak digunakan lagi," ujarnya.

Selain itu pemusnahan arsip juga untuk efisiensi sehingga memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan

serta memberikan tempat bagi arsip yang baru.

"Pemusnahan arsip dilakukan agar memudahkan untuk pencarian arsip, selain itu juga untuk menghindari terjadinya penumpukan di depo arsip," tambahnya.

Sementara itu Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti, MM juga ikut menjelaskan pemusnahan arsip juga merupakan upaya untuk menjaga keamanan informasi pada arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sekaligus menyelamatkan arsip yang bernilai guna.

Dia juga menjelaskan prosedur pemusnahan arsip oleh OPD Pencipta Arsip melalui beberapa tahapan dari pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian arsip, permintaan persetujuan pemusnahan, penetapan arsip yang akan dimusnahkan dan terakhir pelaksanaan pemusnahan arsip.

"Sebelum dimusnahkan, arsip biasanya dilakukan validasi semua OPD memiliki unit ke arsip II. Yang menjadi koordinator adalah sek-

retariat masing-masing perangkat daerah. Menerima semua arsip dari semua bidang-bidangnya, setelah itu divalidasi yang mana arsip statis vital atau arsip usul musnah, setelah itu kemudian diusulkan kembali ke ke ANRI biasanya satu tahun baru disetujui. Seperti BPKAD kemarin itu diusulkan tahun 2021 disetujui 2022 dan 2023 ini baru dilakukan," jelasnya

"Karena persentase arsip itu 10% arsip vital, 30% rujukan pedoman 60% arsip kloning diusulkan musnah, arsip diciptakan dalam satu judul itu bisa sampai 10 eksemplar, dan 1 eksemplar itu arsip vital sisanya 9 eksemplar itu cloning dan bisa dimusnahkan, dan pemusnahan arsip juga kita lakukan agar tidak terjadi ledakan arsip yang tidak memiliki nilai guna," tutupnya.

Diketahui berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip, ditegaskan bahwa arsip yang telah melampaui batas usia ideal yakni 10 tahun harus dimusnahkan. (adv/and)



Salah seorang mahasiswa saat membaca buku di perpustakaan DPK Kaltim.

Begini Alasan Mahasiswa Magang di Perpustakaan Samarinda

SAMARINDA – 10 Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Samarinda memilih untuk magang di Perpustakaan Samarinda yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kota Samarinda.

Berbagai alasan kenapa mahasiswa memilih magang di Perpustakaan Samarinda. Selain menambah ilmu dari hasil kerja praktek dilapangan, juga sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Contohnya, Mar'atus Sholeha yang merupakan salah satu mahasiswi Universitas Mulawarman (Unmul) ini sengaja memilih perpustakaan Samarinda karena bisa sambil mengerjakan tugas skripsi. Menurutnya, Perpustakaan Samarinda sangat menunjang kebutuhannya terutama menyediakan buku referensi sebagai rujukan untuk menyelesaikan tugas akhirnya tersebut.

Mahasiswi berhijab asal kota Balikpapan ini berencana akan membuat skripsi soal website Perpustakaan Kota Samarinda yang menurutnya ada beberapa saran terkait website tersebut.

“Websitenya cukup bagus dan lengkap. Namun cuma ada salah satu fitur yang belum ada m, misalkan tidak ada fitur saran,” bebernya.

Selain itu, Sholeha juga mengaku magang di perpustakaan Samarinda tersebut dipekerjakan selama 40 hari kerja sejak 24 September 2023 lalu dan ditugaskan sebagai pengelola arsip.

“Saya di sini ditugaskan untuk input data atau berkas-berkas kegiatan DPKD Kota Samarinda,” ujar anak ke 4 dari 6 bersaudara ini.

Selain bekerja dan membuat tugas, bagi Sholeha magang di Perpustakaan Samarinda juga sekalian menyalurkan hobi membacanya.

“Saya hobi membaca sejak ke-

cil tapi buku-buku novel dan soal pengembangan diri,” katanya.

Mahasiswa lainnya Alief Fajar Gumilang juga punya alasan kenapa memilih Perpustakaan Samarinda. Selain faktor jarak tempat kost dengan lokasi perpustakaan, mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Jurusan Informatika semester 7 ini juga bisa menikmati fasilitas untuk menunjang kebutuhan belajarnya.

“Saya memilih disini karena kebetulan saya kost di Jalan Hasan Basri. Jadi sangat dekat kalau ke sini dan magang di sini seru karena banyak aktivis belajar yang bisa dilakukan disini,” ungkap Mahasiswa Asal Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ini.

Selain dua perguruan tinggi tadi yang mengirimkan mahasiswanya, adapula mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas 17 Agustus (Untag) dan Universitas lainnya yang ada di sekitar Kota Samarinda. (adv/and)



Beberapa mahasiswa saat mengunjungi perpustakaan Samarinda.

Mengenal Lebih Dekat Perpustakaan Samarinda

SAMARINDA – Perpustakaan Kota Samarinda selain tempatnya yang strategis terletak di tengah-tengah kota, namun memiliki konsep bangunan yang modern. Maka tak heran jika perpustakaan yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda Kota ini mampu menarik banyak pengunjung.

Awak media ini saat berkunjung ke perpustakaan tersebut, Jumat (6/10/2023) lalu, melihat secara dekat keunikan perpustakaan ini. Dari jalan bangunan perpustakaan tersebut berbentuk seperti buku bacaan yang tertutup dengan jendela kaca di tengahnya.

Saat tiba di perpustakaan, kita akan dihadapkan pada lahan parkir yang cukup luas. Setelah memarkirkan kendaraan, di samping parkir sepeda motor terdapat ruang kontrol dan layanan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda. Selanjutnya, kita akan naik ke atas lewat tangga menuju perpustakaan, anak-anak tangga ini nampak berbeda terlihat bagaikan lembaran buku-buku yang tersusun.

Di dalam perpustakaan kita akan disambut oleh meja pelayanan yang dimana petugas layanan akan mengarahkan kita. Jika belum menjadi anggota perpustakaan kita akan didaftarkan dan jika sudah menjadi anggota cukup akan menunjukkan kartu anggota dan men-scan kartu tersebut dengan alat scanner, kita sudah bisa meminjam buku yang kita butuhkan.

Di dalam perpustakaan tersebut nampak rak-rak yang melingkar serta ribuan buku-buku yang tertata rapi di tengah-tengah ruangan.

Sesuai pantauan, sekira pukul 10.00 Wita, perpustakaan sudah ramai pengunjung. Kemudian awak media mencoba mewawancarai salah seorang pengunjung perpustakaan, dan bertemu dengan Novira Salsabilla.

Wanita yang akrab diaapa Novira ini mengaku setiap seminggu sekali berkunjung ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan untuk menunjang belajarnya.

“Saya suka cari buku pelajaran yang berkaitan ekonomi,” ujar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mula-

warman ini.

Dia pun bercerita selama ini dari segi pelayanan dan fasilitas cukup baik yang sudah tersedia di perpustakaan Samarinda. “Fasilitas lumayan lengkap, di sini juga nyaman bersih dan tempat perpustakaan juga unik sih,” ungkapnya.

Diapun berharap untuk para pemuda untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah kota terutama fasilitas yang ada di perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

“Saya datang kesini sama-sama teman mahasiswa juga, ya harapannya kedepan semoga teman-teman lain juga ramaikan perpustakaan, biar bisa menambah wawasan,” pungkasnya.

Perpustakaan Samarinda selain memiliki fasilitas yang cukup lengkap bagi pembaca, dalam perpustakaan ini pengunjung juga bisa memanfaatkan ruangan-ruangan yang memiliki fasilitas lain semacam dari, ruangan Belajar anak dan bermain anak, Ruang Multi media beserta peralatan multi medianya. (adv/and)



Sekprov Kaltara Suriansyah memastikan kebutuhan beras di Kaltara masih terkendali.

Terus Berkoordinasi, Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok

TANJUNGSSELOR—Gerakan pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah Kaltara merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak. Apalagi, belakangan ini warga Kaltara menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah saat dikonfirmasi menjelaskan gerakan pangan murah dilakukan, guna mengatasi kenaikan pangan yang dialami saat ini.

“Manfaatnya bagi masyarakat yang terdampak, seperti contoh musibah yang terjadi di Kabupaten Malinau. Ini tentunya, sektor pertanian masyarakat disana ikut terdampak,”ujarnya, saat ditemui wartawan, Senin(16/10/2023).

Selain itu, program ini merupakan cara pemerintah untuk tetap memberikan peluang dan kesempatan bagi

masyarakat, dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang ekonomis. Pemerintah kaltara, kata dia akan melakukan beberapa cara dalam menekan adanya kenaikan harga pangan.

Selain gelar pasar murah, juga intens berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota. “Yang diketuai oleh masing-masing sekda di daerah. Koordinasi bertujuan untuk menggtahui dan memetakan kira-kira bahan pokok makanan apa saja yang memang memengaruhi,”imbuhnya.

Kendala di lapangan, apakah yang berkaitan dengan akses transportasi karena produknya di datangkan dari luar wilayah. Atau kemungkinan, masyarakat kesulitan dalam mendapatkan bahan pokok sesuai

dengan kebutuhan. “Tapi, sementara ini masih bisa dikendalikan,”-jelasnya.

Adapun, untuk kebutuhan beras di Kaltara masih bisa dikendalikan bersama dengan Bulog. Salah satunya, berkolaborasi dengan Bulog dengan menggelar pasar murah. “Besok akan kita gelar pasar murah secara serentak, namun terlebih dahulu dirapatkan soal teknisnya,”tuturnya.

Gerakan pangan murah menyajikan beberapa paket sembako, diantaranya beras 5 kilo seharga, Rp 52 ribu, minyak kita Rp 12 ribu, telur ayam satu piring, Rp 50 ribu, bawang merah satu kilo Rp 21 ribu, bawang putih Rp 33 ribu per kilo dan gula pasir Rp 14. ribu. (tin/and)

Editor: Andhika



ADE/MKR

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Oktober Berduka melakukan demo.

Aliansi Oktober Berduka Demo Polres Tarakan, Ini 4 Tuntutannya!

TARAKAN - Puluhan mahasiswa Tarakan yang tergabung dalam Aliansi Oktober Berduka melakukan aksi demo di Mako Polres Tarakan, Senin (16/10/2023) sore. Aksi demo ini menuntut kepolisian mengusut tuntas kematian masyarakat Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Korban diduga tewas terkena tembakan saat menuntut PT Hambaran Masawit Bangun Persada (HMBP) I segera menyediakan kebun plasma.

Sebelum menuju Polres Tarakan, Aliansi Oktober Berduka berkumpul di Gedung Graha KNPI. Dari pantauan mediakaltimara.com, mereka bergerak menuju Polres Tarakan sekira pukul 16.00 Wita. Sementara demo berakhir pukul 17.20 Wita.

Koordinasi Lapangan (Korlap) demo, Berto menuturkan, ada empat poin yang menjadi tuntutan Aliansi Oktober Berduka. Yang pertama, kata Berto, tangkap dan adili oknum aparat kepolisian yang menewaskan nyawa masyarakat sipil Kabupaten Seruyan.

Kedua, meminta Kapolri bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga korban. Yang ketiga, copot jabatan Kapolda Kalteng beserta Kapolres kabupaten Seruyan dan tuntaskan permasalahan

tersebut.

“Dan keempat, hentikan tindakan refresif terhadap gerakan mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil,” tegas Berto saat ditemui usai melakukan aksi demo di Mapolres Tarakan, Senin (16/10/2023) sore.

Adapun yang tergabung dalam Aliansi Oktober Berduka, di antaranya Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Ikatan Mahasiswa Dayak Kota Tarakan (IMDKT), Forum Keluarga Mahasiswa Dayak Agabag Tarakan (FKMDA-Tarakan), FPMTK, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dia menjelaskan demo pada hari ini merupakan aksi jilid II. Aksi sebelumnya dilaksanakan Rabu (11/10/2023) sekira pukul 16.00 Wita. Menurutnya, aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas atas dasar kemanusiaan.

Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tarakan mengatakan, kecewa sebab saat melakukan aksi, Kapolres Kota Tarakan tidak bersedia menemui dan menedengar tuntutan aksi massa. Untuk itu, dia bersama mahasiswa lainnya melayangkan mosi tidak percaya kepada Polres Tarakan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika





H. Mula (60) saat ditemukan Tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia.

ADE/MKR

Dua Hari Pencarian, Nelayan yang Hilang di Perairan Bunyu Ditemukan Meninggal Dunia

TARAKAN - Tim SAR gabungan berhasil menemukan nelayan bernama H. Mula (60) warga Juwata Laut, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang hilang saat memancing di perairan Bunyu. Tim SAR menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, pada Senin, (16/10/2023) siang.

H. Mula ditemukan pada pencarian hari kedua oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas Tarakan) bersama tim gabungan. Korban pertama kali ditemukan sekira pukul 14.45 Wita pada radius atau jarak 16,36 NM dari lokasi kejadian.

"PD TW 1016 14.45 WITA Tim SAR gabungan telah menemukan korban (H. Mula) dalam Keadaan

MD pada koordinat 3°20'48.18"N 117°54'49.60"E dengan radius 16.36 NM dari LKP," ucap Kepala Basarnas Tarakan, Syahril.

Selanjutnya, jenazah korban di evakuasi dan dibawa tim SAR untuk diserahkan ke pihak keluarga. "Kemudian tim SAR mengevakuasi korban dan langsung membawa jenasanya ke rumah keluarga korban," jelasnya.

Dengan ditemukannya jenazah korban, maka operasi SAR resmi ditutup. "PD TW 1016 15.00 WITA Ops SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup serta unsur gabungan yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing," terang Syahril.

Diberitakan sebelumnya, seo-

rang pria dilaporkan hilang di sekitar perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Diketahui, pria tersebut bernama H. Mula (60), warga Juwata Laut yang hilang setelah sebelumnya memancingikan di perairan tersebut.

Laporan hilangnya korban diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tarakan pada Minggu, (15/10/2023) pagi. Adapun informasi terkait kejadian tersebut, di terima Basarnas Tarakan dari salah seorang anggota Koramil Tarakan Utara. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika



ADE/MKR

Zoom meeting rapat koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah dengan Kementerian Dalam Negeri.

Beras jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Tarakan

TARAKAN - Sejumlah komoditas tercatat menjadi penyumbang inflasi di Kota Tarakan. Salah satunya, komoditas beras yang menyumbang inflasi terbesar pada September 2023 yakni 0,04 persen.

"September 2023, pertama itu beras 0,04 persen, kemudian ikan layang 0,03 persen dan kacang panjang 0,2 persen," ucap Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto usai melakukan zoom meeting pengendalian inflasi daerah di Kantor Wali Kota Tarakan, Senin (16/10/2023) pagi tadi.

Effendhi menuturkan pada September 2023, inflasi Kota Tarakan sebesar 0,03 persen Month-to-Month (MTM). Sedangkan laju inflasi tahun ke tahun sebesar 2,28 persen Year on Year (YOY). Dilanjutkannya, untuk

inflasi Year on Year (YOY) di Kota Tarakan, penyumbang inflasi tertinggi adalah angkatan udara dengan 0,50 persen. Diikuti daging ayam ras 0,29 persen dan besar 0,22 persen.

Menyikapi naiknya harga beras ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Tarakan bersama distributor dan intansi terkait seperti Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) untuk melakukan pasar murah. Dicanakan, pasar murah ini akan dilaksanakan pada Selasa (17/10/2023) di Masjid Al Ma'arif.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tarakan, kata Effendhi, menerapkan strategi 4K untuk pengendalian inflasi. Yang pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan-

gan melakukan koordinasi bersama Perum Bulog dan distributor. Selain itu, rutin melakukan sidak pasar secara rutin. Yang kedua, menjaga ketertjangkauan harga dengan melakukan monitoring harga di pasar tradisional setiap hari. Serta melakukan operasi pasar di sejumlah titik

Yang ketiga, menjaga kelancaran distribusi yakni melakukan kerjasama dengan stakeholder transportasi dan mempermudah kelancaran lalu lintas arus distribusi barang dan jasa. Dan keempat, melakukan komunikasi efektif dengan melakukan sosialisasi belanja bijak kepada masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika





Lantamal XIII menyambut kedatangan Tentera Laut Diraja Malaysia dan Angkatan Laut Filipina.

ADE/MKR

Jamin Keamanan Laut Perbatasan, Lantamal XIII Gelar Latihan Gabungan Bersama Dua Negara

TARAKAN - Upaya pengamanan wilayah laut perbatasan terus dilakukan Lantamal XIII Tarakan. Terbaru, Lantamal XIII Tarakan menggelar latihan gabungan bersama dua negara yakni Malaysia dan Filipina, Senin (16/10/2023). Latihan ini dijadwalkan berlangsung hingga 19 Oktober 2023 mendatang.

Sebelum memulai latihan, kegiatan diawali dengan KRI Singa-651 menjadi guide atau memimpin Kapal-kapal Diraja Malaysia menuju alur dermaga hingga menempati posisi kapal sandar. Dilanjutkan dengan penyambutan secara adat Kalimantan Utara dengan Pengalungan Selendang Adat kepada Komandan KD Badik Commander M. Hazamri Bin Hasan dan Komandan KD Paus Commander Marzuki Bin Abdullah. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Tarian Adat Khas Kalimantan Utara.

Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Deni Herman melalui Wadan Lantamal XIII Kolonel Marinir Bambang Wahyuono mengatakan, latihan ini tergabung dalam kerjasama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi 2023.





Dilanjutkannya, kedatangan Tentera Laut Diraja Malaysia dan Angkatan Laut Filipina ini, dalam rangka latihan bersama Port Visit Indomalphi 2023 dengan TNI Angkatan Laut Indonesia, khususnya prajurit Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIII Tarakan. Latihan ini, kata Deni, dijadwalkan akan dilaksanakan di wilayah perbatasan yakni Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan ini, Deni mengucapkan selamat datang kepada Komandan KDBadik dan KDPaus beserta rombongan. "Suatu kehormatan dan kebanggaan bisa berjumpa dalam Kerjasama sebagaimana komitmen yang telah disepakati oleh para pemimpin," katanya.

Melalui kegiatan ini, dia berharap dapat meningkatkan produktivitas setiap kegiatan yang dilaksanakan

bersama. "Komitmen bersama ini harus kita lanjutkan dengan berbagai kegiatan lain yang juga akan meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi yang telah terbangun selama ini", pungkash Wadan Lantamal XIII saat membacakan amanat Laksma TNI Deni. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

